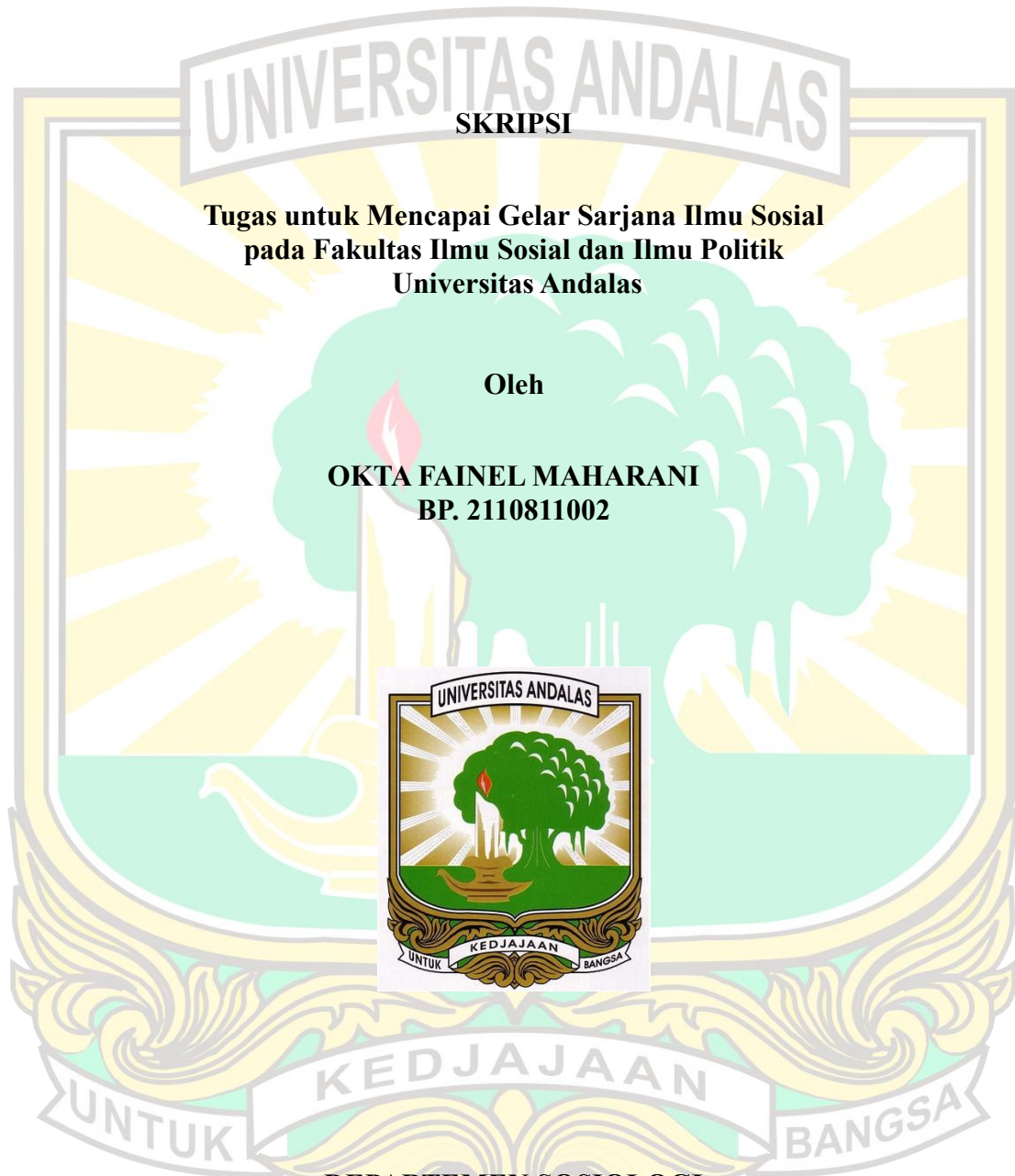


**PENYEBAB KERAPATAN ADAT NAGARI TABEK PATAH
TIDAK MENYETUJUI SERTIFIKASI TANAH PUSAKA TINGGI**



**PENYEBAB KERAPATAN ADAT NAGARI TABEK PATAH
TIDAK MENYETUJUI SERTIFIKASI TANAH PUSAKA TINGGI**



SKRIPSI

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Oleh

**OKTA FAINEL MAHARANI
BP. 2110811002**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2025**

OKTA FAINEL MAHARANI, 2110811002. Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Judul Skripsi: Penyebab Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah Tidak Menyetujui Sertifikasi Tanah Pusaka Tinggi. Pembimbing Prof. Dr. Afrizal, MA.

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 melaksanakan pendaftaran dan sertifikasi tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pemerintah menerapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mempercepat proses tersebut. Namun, implementasi PTSL terhadap tanah pusaka tinggi di Sumatera Barat menghadapi kendala, salah satunya adalah penolakan pimpinan adat untuk mensertifikatkan tanah pusaka tinggi seperti yang terjadi di Nagari Tabek Patah. Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah tidak menyetujui permintaan BPN Tanah Datar untuk pendaftaran tanah pusaka tinggi di Nagari Tabek Patah.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pengambilan keputusan KAN Tabek Patah serta motif yang mendasari keputusan tidak menyetujui sertifikasi tanah pusaka tinggi. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah fenomenologi Alfred Schutz, khususnya konsep *because motive* (motif sebab) dan *in order to motive* (motif tujuan). Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Informan dipilih secara *purposive* sesuai relevansi peran mereka dalam isu penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penetapan ketidaksetujuan KAN Tabek Patah terhadap sertifikasi tanah pusaka tinggi melalui rapat resmi KAN yang dihadiri oleh sebagian besar anggota KAN dari unsur ninik mamak. Setelah rapat, pengurus KAN menetapkan kesepakatan ninik mamak dan menyampaikannya kepada BPN dan warga nagari. Penyebab KAN tidak menyetujui terbagi dua yaitu *because motive* dan *in order to motive*. *Because motive* meliputi pengalaman masa lalu bahwa tanah bersertifikat sering dijual, proses pensertifikatan tanah komunal itu rumit karena dari pengalaman mereka membuat persetujuan atas tanah pusaka tinggi membutuhkan kesepakatan dari seluruh anggota kaum dan sertifikasi tanah pusaka tinggi membuat hilangnya wewenang ninik mamak dalam urusan tanah. *In order to motive*-nya adalah KAN tidak menyetujui pensertifikatan tanah pusaka tinggi untuk menjaga keberlanjutan hukum adat dan peranan ninik mamak dalam nagari.

Kata Kunci: Fenomenologi Alfred Schutz, Kerapatan Adat Nagari, PTSL, Sertipikat, Tanah Pusaka Tinggi

OKTA FAINEL MAHARANI, 2110811002. Sociology Department, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas. Thesis title: The Cause of the Tabek Patah Nagari Customary Council's Disapproval of the Certification of High Heritage Land. Supervisor Prof. Dr. Afrizal, MA.

ABSTRACT

The Government of Indonesia, through the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960, implements land registration and certification to ensure legal certainty for landowners. To accelerate this process, the government introduced the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. However, the implementation of PTSL for *tanah pusaka tinggi* (high ancestral land) in West Sumatra faces challenges, particularly the refusal of traditional leaders to certify such land, as exemplified in Nagari Tabek Patah. The Nagari Customary Council (KAN) of Tabek Patah rejected the request from the National Land Agency (BPN) of Tanah Datar to register *tanah pusaka tinggi* in their nagari.

The purpose of this study is to describe the decision-making process of KAN Tabek Patah and the underlying motives for rejecting the certification of *tanah pusaka tinggi*. The research applies Alfred Schutz's phenomenology, especially the concepts of *because motive* and *in order to motive*. A qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews and document analysis. Informants were selected purposively based on their relevance to the issue.

The findings reveal that the decision to reject certification was made through a formal KAN meeting attended by most *ninik mamak* (clan leaders). Following the meeting, the KAN leadership formalized the collective agreement and communicated it to both BPN and the local community. The motives behind the rejection are categorized into *because motive* and *in order to motive*. The *because motive* includes past experiences showing that certified land is often sold, the certification process for communal land is complicated since it requires the consent of all clan members, and certification would diminish the authority of *ninik mamak* in land affairs. The *in order to motive* is that KAN rejected the certification of *tanah pusaka tinggi* to safeguard the continuity of customary law and the traditional role of *ninik mamak* within the nagari.

Keywords: Alfred Schutz Phenomenology, High Ancestral Land, Kerapatan Adat Nagari, Land Certification, PTSL.